

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN OBJEK
WISATA EMBUNG POTORONO DI KALURAHAN POTORONO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Disusun Oleh:

Fahmi Maulana Ikhsan

20520058



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2024**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN OBJEK
WISATA EMBUNG POTORONO DI KALURAHAN POTORONO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Ilmu Pemerintahan**



Disusun Oleh:

Fahmi Maulana Ikhsan

20520058

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Januari 2024

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si**

Ketua Penguji/Pembimbing

2. **Dr. Adji Suradji Muhammad, S.sos., M.Si**

Penguji Samping I

3. **Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si**

Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Rijel Samaloisa

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fahmi Maulana Ikhsan

Nim : 20520058

program studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Objek Wisata Embung Potorono Di Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Januari 2024



Fahmi Maulana Ikhsan
20520058

MOTTO

itami o kanjūro!, itami o kangaero!,
itami o uketore!, itami o shire!.
Itami o shiranu mono ni, hontou no heiwa
wakaran. Koko yoroi sekai ni itamio !

SHINRATENSE!!!!

Rasakan Kepedihan!, Pikirkanlah Kepedihan!,
Terimalah Kepedihan!, Ketahuilah Kepedihan!,
orang yang tidak tahu kepedihan tidak
akan mengerti kedamaian yang sebenarnya. Dari sini,
dunia harus menerima kepedihan!

-Pain Akatsuki-

Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanya mimpi yang tertunda
Cuma sekiranya kalau teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi.

Jangan khawatir, mimpi-mimpi lain bisa diciptakan.

-Windah Basudara-

“Orang lain ga akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success storiesnya* saja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini!”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, terima kasih kepada bapak Suhidyanto dan ibu Rumanti. Terima kasih atas semua bentuk dukungan yang telah diberikan kepada saya, terutama atas doa-doa yang telah diberikan, tentu saya tidak akan bisa membalas semua jasa yang telah orang tua saya berikan.
2. Terima kasih juga untuk kakak perempuan saya, Rima Prisma Nandani yang sering mendukung peneliti dari berbagai aspek, doa dan memberikan uang ketika saya malu untuk meminta uang kepada kedua orang tua.
3. Terima kasih juga untuk adik perempuan saya, Ernita Nazira Pramesti yang selalu menjadi tempat penyaluran stres saya, dengan cara menjahilinya sampai membuat-Nya menangis, sehingga peneliti bisa kembali ceria dan bersemangat untuk menuntaskan skripsi ini.
4. Terima kasih juga saya ingin berikan kepada dosen pembimbing saya Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada para dosen penguji saya yang telah bersedia menguji skripsi ini dan memberikan masukan untuk memperbaiki skripsi ini yakni Dr. Adji Suradji Muhammad, S.sos., M.Si sebagai dosen penguji samping I (satu) dan Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si sebagai dosen penguji samping II (dua).

5. Terima kasih juga saya ingin sampaikan kepada seluruh Dosen STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pendidikan akademik selama saya menempuh di kampus Desa yang luar biasa ini STPMD “APMD” Yogyakarta dengan penuh integritas.
6. Terima kasih juga kepada Juliastuti Purwanti S.Pd. sebagai partner spesial saya, yang telah memberikan semangat kepada saya, selalu menemani dalam keadaan apapun dan menerima sifat yang ugal-ugalan dari peneliti.
7. Terima kasih kepada teman serta sahabat yang telah mendukung dan sport peneliti dalam menyusun skripsi dan rekan-rekan grup Hall APMD yang telah membantu peneliti dalam bertukar informasi ketika ada informasi dari kampus.
8. Semua yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per-satu, peneliti ucapkan terima kasih semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan anugerah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Objek Wisata Embung Potorono Di Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Secara substansial skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang *collaborative governance* yang terjadi dalam pengelolaan objek wisata embung potorono. Di Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, keterbatasan, baik itu dalam pengetahuan serta wawasan dalam berpikir dan menulis. Maka dari itu apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dimohon untuk kritik dan sarannya. Peneliti juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak dapat menyelesaikan sendiri, untuk itu dengan segenap kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.sos., M.Si sebagai dosen penguji samping I (satu) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si sebagai dosen penguji samping II (dua) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu peneliti dalam memberikan bimbingan dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan di STPMD “APMD” Yogyakarta.
7. Bapak/Ibu Dosen, serta segenap karyawan Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
8. Pemerintah Kalurahan Potorono, pengelola embung potorono, dan masyarakat Kalurahan Potorono yang telah memberikan izin, ruang, tempat, waktu dan dukungan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat penelitian	7
1. Manfaat Akademis	7
2. Manfaat Praktis	7
F. Literature Review	7
G. Kerangka Konseptual	14
1. Government	14
2. Kebijakan Publik.....	15
3. Proses Collaborative Governance	17
4. Kepariwisata.....	23
H. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis penelitian.....	26
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3. Subjek Penelitian	28
4. Objek Penelitian.....	29
5. Teknik Pengumpulan Data.....	29

6. Teknik Analisis Data	30
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	32
A. Sejarah Kalurahan Potorono.....	32
1. Kondisi Geografis	40
2. Keadaan Demografi	42
B. Deskripsi Objek Wisata Embung Potorono.....	48
1. Fasilitas /Sarana dan Prasarana Objek Wisata.....	49
2. Event-Event/Kegiatan.....	53
3. Pengelolaan Objek Wisata Embung Potorono.....	54
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	57
A. Deskripsi Informan	57
B. Proses Collaborative <i>Governance</i> Dalam Pengelolaan Objek Wisata Embung Potorono	60
C. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	79
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR ISI.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Desa Potorono	42
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Informan.....	28
Tabel 2. 1 Nama Padukuhan dan Jumlah Rt	33
Tabel 2. 2 Luas wilayah	40
Tabel 2. 3 Klimatologi dan Hidrologi.....	41
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	43
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	44
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian	45
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 1 Panduan wawancara	87
Lampiran 1 2 Ringkasan Data.....	89
Lampiran 2 1 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi.....	91
Lampiran 2 2 Surat Permohonan Izin Penelitian	92
Lampiran 2 3 Surat Tugas Penelitian	93
Lampiran 3 1 Dokumentasi.....	94
Lampiran 4 1 SK.....	96

INTISARI

Skripsi ini membahas proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan objek wisata embung potorono di Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Spesifikasi Embung Potorono diawali dari mulainya keterbatasan Pemerintahan Kalurahan Potorono dalam mengelola objek wisata maka diperlukannya kolaborasi yang harus dilakukan Kalurahan Potorono untuk mengelola dan memajukan destinasi wisata Embung Potorono supaya embung potorono tidak hanya dikelola oleh satu pihak saja.

Skripsi ini berfokus pada bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam mengelola objek wisata embung potorono dan pemberdayaan pokdarwis untuk memajukan pengelolaan objek wisata embung potorono di Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi ini menggunakan model *process collaborative governance* yang diungkapkan oleh Ansell and Gash dalam mengetahui interaksi yang terjadi oleh setiap aktor dalam pengelolaan objek wisata embung potorono. Terdapat 5 indikator yakni, *Face to Face Dialog*, *Commitment to Process*, *Trust Building*, *Shared Understanding*, *Intermediate Outcomes*.

peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data digunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian ini berjumlah 6(enam) narasumber yang termuat dalam Pemerintahan Kalurahan Potorono, Kelompok Pengelola Embung Potorono dan Ketua Pokdarwis. Penentuan subjek pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* untuk menentukan informan yang dianggap ahli dalam bidangnya.

Proses *Collaborative Governance* dalam mengelola objek wisata embung potorono dan pemberdayaan pokdarwis untuk memajukan pengelolaan objek wisata embung potorono di Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah berjalan cukup maksimal dilihat dari beberapa indikator pengukuran yang dikemukakan oleh Ansell and Gash yang semuanya sudah terpenuhi hanya masih kurang di bagian *Trust Building* karena masih ada sebagian masyarakat yang belum percaya terhadap pemerintahan.

Faktor pendukung kolaborasi merupakan hal penting, faktor pendukung kolaborasi penelitian ini berupa setiap anggota atau pemangku kepentingan yang terlibat didalam kolaborasi paham akan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari masing-masing. Faktor penghambat kolaborasi dalam penelitian ini berupa, masih ada beberapa warga yang belum percaya dengan salah satu pemangku kepentingan atau aktor yang terlibat dalam kolaborasi

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Pengelolaan, Pemberdayaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sektor pariwisata memiliki peran penting sebagai salah satu sumber bagi penerima devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara, seperti Indonesia yang kaya akan potensi dan sumber daya yang sangat besar terhadap industri pariwisata di dalamnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 11 pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

Kepariwisataan menjadi salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tepat memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup. Pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, oleh karena itu pariwisata harus dikelola dan dikembangkan secara baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dengan pentingnya peran kepariwisataan maka diperlukan tata kelola yang baik. *collaborative governance* (tata kelola pemerintahan kolaborasi) Ansell and Gash menjelaskan bahwa pemerintahan *Collaborative* atau *collaborative governance*. Bentuk dari *Governance* yang melibatkan berbagai *stakeholder* atau para pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama. *Collaborative governance* merupakan suatu tata kelola yang mengatur satu atau lebih lembaga-lembaga publik yang secara langsung terlibat baik negara maupun non-negara, termasuk pemangku kepentingan, dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan musyawarah.

Balogh, melihat kolaborasi pemerintah terbagi menjadi 3 proses yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, dan dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi. Dinamika kolaborasi memainkan peran penting dalam menggerakkan proses kolaborasi, kualitas pelaksanaan kolaborasi dapat ditempuh dalam keterlibatan prinsip, motivasi bersama, dan kemampuan untuk bertindak bersama.

Tindakan-tindakan *Collaborative* mencerminkan esensi dinamika kolaborasi, dimana pencapaian tindakan kolaborasi tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu organisasi. Hasil dari tindakan kolaborasi sering dilihat sebagai dampak sementara yang kembali terkait dengan dinamika kolaborasi.

Dampak dan adaptasi dalam proses kolaborasi merujuk pada efek yang muncul akibat proses kolaborasi, termasuk karakteristik yang

diharapkan dan yang tidak diharapkan. Dampak ini dapat memicu umpan balik yang kemudian diadaptasi oleh entitas kolaborasi.

Dalam *Collaborative* masing-masing pihak diikat oleh adanya satu kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu, yang dirasakan oleh para pihak sangat mengganggu kepentingannya. Kemauan untuk melakukan kerja sama muncul karena adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu organisasi publik dengan mitranya dari organisasi di sektor privat. Keduanya merasa bahwa masalah atau kepentingan tersebut dapat diselesaikan secara lebih mudah apabila mereka secara bersama-sama bekerja untuk mencari solusi terhadap masalah atau kepentingan bersama tersebut. Masalah atau kepentingan bersama menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi perkembangan kolaborasi antara organisasi publik, privat dan organisasi kemasyarakatan.

Kota Yogyakarta adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berada di Indonesia. Kota Yogyakarta adalah kota besar yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa, dan menawarkan berbagai objek wisata baik itu wisata alam, budaya dan wisata buatan. Banyaknya objek wisata yang ada di Yogyakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara.

Komitmen pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata merupakan langkah yang bagus dalam mengoptimalkan potensi yang ada di Indonesia. Dengan adanya komitmen, daerah-daerah yang belum melirik sektor pariwisata sebagai hal yang perlu dikembangkan dengan

tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat termotivasi untuk menjadikan daerahnya sebagai destinasi wisata. hal ini disebabkan karena pariwisata dapat menjadi kekuatan ekonomi.

Embung Potorono merupakan salah satu objek wisata buatan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal, embung Potorono merupakan kola bendungan sungai serupa telaga berbentuk lonjong. Lokasinya yang berada di pinggiran sungai dengan pepohonan rindang, menjadikan tempat ini cocok untuk wisata keluarga atau sekedar bersantai. Objek wisata yang dikelola Desa tersebut memiliki berbagai fasilitas seperti wahana bermain untuk anak-anak yang disewakan oleh warga setempat, kemudian ada rute untuk jogging mengelilingi embung, dan ada juga fasilitas seperti perahu yang dikayuh untuk menyusuri ke tengah embung Potorono.

Embung Potorono dibangun oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 awalnya embung Potorono di bangun untuk digunakan sebagai tempat tampungan air atau ketersediaan air di musim kemarau daerah Potorono, namun seiring dengan berjalannya waktu embung Potorono digunakan sebagai objek wisata alternatif. Pengelolaan dari objek wisata embung Potorono dari provinsi diserahkan kepada pihak Kalurahan Potorono, kemudian pihak Kalurahan melakukan kolaborasi dengan masyarakat setempat guna mengelola objek wisata ini.

Namun dalam proses pengelolaan dan mengembangkan objek pariwisata embung Potorono, pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat

setempat, dasar dari kolaborasi tersebut pemerintah Kalurahan menjadikan objek wisata embung Potorono ini sebagai salah satu aset BUMKal (badan usaha milik Kalurahan) dan menyerahkan kepengurusan atau pengelolaan objek wisata ini kepada kelompok dan Padukuhan salakan yang berjumlah 10 (sepuluh) RT, namun kolaborasi yang dilakukan ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena masih kurang pemahamnya masyarakat lokal terhadap kolaborasi yang dilakukan oleh Kalurahan Potorono dan menganggap Kalurahan Potorono seperti akan mengambil pendapatan yang sudah didapatkan oleh masyarakat sekitar Embung Potorono.

Karena tata kelola yang baik merupakan tugas dan kewajiban dari pemerintah untuk memberikan pelayanan dan menghadirkan kebijakan yang bisa membahagiakan warganya, maka pemerintah wajib untuk mengusahakan kebijakan itu terealisasikan baik dalam hal apapun seperti dalam pengelolaan objek wisata Embung Potorono. Namun karena pemerintah juga terkendala keterbatasan SDM maka harus dilakukan kolaborasi untuk mengelola objek wisata Embung Potorono, dimana pemerintah Potorono berkolaborasi dengan pokdarwis, dan kelompok pengelola dimana kelompok pengelola ini berisi masyarakat sekitar Embung Potorono yakni masyarakat padukuhan Salakan.

Berdasarkan pemaparan diatas menjadi pertimbangan atau alasan peneliti untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai “*Collaborative Governance* dalam pengelolaan objek wisata embung Potorono” dalam penelitian ini peneliti mencoba menggali informasi tentang *Collaborative* yang ada di objek wisata embung Potorono. Peneliti akan menggunakan

salah satu dari lima mazhab Timoho (5G) Government, Governing, Governability, Governance, Governmentality. Yang dijadikan dalam penelitian ini menggunakan governance dimana governance berbicara tentang tata kelola, relasi politik, relasi kekuasaan dalam pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti adalah, Bagaimana proses kolaborasi dalam pengelolaan objek wisata embung Potorono?

C. Fokus Penelitian

Supaya penelitian ini lebih terarah maka penelitian ini berfokus pada:

1. Proses *Collaborative Governance* Kalurahan Potorono dalam pengelolaan embung Potorono

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai:

1. Penelitian Ini Menghasilkan Informasi Untuk Penelitian Sejenis Tentang Proses *Collaborative Governance* Pengelolaan Objek Wisata Embung Potorono
2. Penelitian Ini Menghasilkan Data Mengenai Proses *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Objek Wisata

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) manfaat, manfaat akademis dan praktis yakni:

1. Manfaat Akademis

- a. Memberitahukan pengetahuan dan wawasan tentang *Collaborative Governance* dalam pengelolaan objek wisata
- b. Untuk bahan kepustakaan bagi peneliti yang sama ingin melakukan kajian terhadap kolaboratif Governance dalam pengelolaan objek wisata

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai rujukan dalam melaksanakan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan objek wisata
- b. Memberikan gambaran tentang *Collaborative Governance*, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola objek pariwisata

F. Literature Review

Penelitian tentang *Collaborative Governance* bukanlah sesuatu yang baru. Peneliti-peneliti terdahulu telah berupaya untuk mengungkapkan tentang kolaboratif Governance dalam pengelolaan objek wisata, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), Volume VI, Nomor 02, Tahun 2021. Penelitian Yosep Molla, Tjahya Supriatna, dan Layla Kurniawati berjudul *Collaborative Governance dalam pengelolaan kampung wisata Praijng di Desa Terbang Kecamatan Kota*

Walikumbak Kabupaten Sumba Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengelolaan kampung wisata Prajingan belum berjalan efektif dilihat dari kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitator dan proses kolaborasi yang menghasilkan model kolaborasi di kampung wisata Prajingan. Hal ini disebabkan karena faktor internal dan eksternal, faktor internal seperti budaya, geografis, kualitas, SDM yang kurang, atraksi budaya yang tidak dikemas dengan baik, dan penataan infrastruktur umum yang mengurangi nilai kampung wisata Prajingan. Sedangkan faktor eksternal dilihat dari kebijakan Pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah yang dikeluarkan guna mendukung sistem kepariwisataan, pemanfaatan teknologi sebagai sarana promosi, dan terdapat ancaman dari faktor eksternal berupa daya saing objek wisata sejenis serta pergeseran nilai budaya akibat perkembangan teknologi dan informasi. (Molla, Supriatna, and Kurniawati 2021)

Kedua, Jurnal *Governance*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2021. Penelitian Nadia F. Tongkotow, Welly Waworundeng, dan Alfon Kimbal yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok*. Hasil dari penelitian menunjukkan pengembangan pariwisata yang dilakukan pantai lakban yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara ternyata kurang melibatkan dan kurang memperhatikan masyarakat Desa Ratatotok Timur. Kolaborasi antara ketiga pihak dalam mengelola pantai lakban yang ada di Desa Ratatotok Timur bisa disebut dengan kemitraan Pemerintah-Swasta-Masyarakat merupakan modal operasional sinergis untuk mencapai

pembangunan secara berkelanjutan dimana tiga pihak secara bersama-sama mengembangkan unit usaha atau layanan yang saling menguntungkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.(Tongkotow, Waworundeng, and Kimbal 2021)

Ketiga, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2021. Peneliti Iman Surya, Sanny Nofirma, Herdan Arie Saputra, dan Niken Nurmiyati yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo*. Hasil dari penelitian menunjukkan *Collaborative Governance* sebagai alternative yang dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi kawasan pariwisata, dan menilai *Collaborative Governance* sebagai paradigma baru yang digunakan untuk menghadapi isu yang beragam dalam masyarakat yang kompleks, yang dimaksud paradigma disini adalah kesetaraan hubungan antara pemangku kepentingan. Sehingga Wisata Kebun Teh Nglinggo Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu sumber pendapatan untuk masyarakat lokal dengan tingkat wisatawan berkunjung ke pariwisata hingga meningkatkan pendapatan masyarakat.(Surya et al. 2021)

Keempat, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023. Peneliti Aco Nata Saputra, Andi Nur Fiqhi Utami, Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah, Citra, Fariaty, dan Ahmad Amirudin yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Polewali*. Hasil penelitian dinamika kolaborasi ada aspek motivasi yang meliputi kepercayaan dan pemahaman bersama, terbangun kepercayaan

antara pelaksanaan proses kolaborasi antara DISPOP dengan pihak asosiasi usaha pariwisata. Tindakan-tindakan kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata dalam menafsirkan kolaborasi belum maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki namun hal ini tidak dapat dijadikan alasan terhambatnya kolaborasi, karena untuk memajukan proses kolaborasi dapat dilihat dalam komunikasi yang aktif, dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar sudah dapat terlihat. Dibuktikan dengan adanya hasil kolaborasi bersama antara DISPOP dengan pihak asosiasi usaha dalam wujud regulasi, program kegiatan, event dan destinasi wisata baru.(Saputra et al. 2023)

Kelima, Jurnal Ilmu Wahana Pendidikan, Volume 8, Nomor 7, Tahun 2022. Penelitian Wida Lestari, Eka Yulyana, Lina Aryanti yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Alam Green Canyon di Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang*. Hasil dari penelitian menunjukkan proses kolaborasi tidak berjalan seirama dengan yang diharapkan dimana swasta selaku pemodal tidak memberikan sesuai dengan kebutuhan, dan masyarakat tidak tahu secara pasti gerakan kolaborasi serta tidak adanya ajakan yang pasti dari pihak pemerintah terkait. Serta dari kondisi awal yang kurang dari segi fasilitas yang menunjukkan kenyamanan maupun keselamatan, ada juga dari faktor desai kelembagaan *Collaborative Governance* dalam mengoptimalkan pengelolaan tempat wisata Green Canyon, dan dipengaruhi kepemimpinan fasilitatif pada *Collaborative Governance* dalam mengoptimalkan pengelolaan tempat wisata tidak berjalan optimal

karena ketidakjelasan partisipasi dan minimnya pengetahuan dari *stakeholder* terkait kolaborasi.(Lestari et al. 2022)

Keenam, Jurnal Administrasi & Kebijakan, Volume 22, Nomor 2, Tahun 2023. Peneliti Rini Kusumawati, Supri Hartono, Dida Rahmadanik yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Desa Wisata Pelang Kabupaten Tuban*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Desa Wisata Palang di Desa Tahlul Kabupaten Tuban sudah berjalan secara maksimal. Perihal ini terlihat dari sebagian aspek *collaborative governance* menurut Balogh, ialah dinamika kolaborasi(komunikasi, kepercayaan, komitmen, serta sumber daya), tindakan- tindakan kolaborasi(memfasilitasi serta memajukan proses kolaborasi), dan dampak serta adaptasi dari proses kolaborasi(dampak sosial).(Kusumawati, Hartono, and Rahmadanik 2023)

Ketujuh, Jurnal Governance of Archipelago, Volume VI, Nomor 1, Tahun 2023. Peneliti Sumitro S Syawal dan Sofjan Alizar Sam yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Teluk Powate Sebagai Destinasi Wisata di Pulau Makian*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam dinamika pengelolaan wisata Teluk Powate Tidak lagi merupakan representasi dari wilayah pemerintah desa Suma tetapi mulai meluas menjadi potensi wisata kecamatan Pulau Makian maupun Kabupaten Halmahera Selatan yang dipadupadankan dengan wisata Alam dan budaya suku Makian, kolaborasi bisa dilakukan berdasarkan keputusan Bupati Halmahera Selatan membuat Villa persinggahan dan merenovasi fasilitas penduduk lainnya nilai yang

melandasi pembukaan kembali Objek Wisata Teluk Powate adalah menghidupkan kembali tradisi Maka Pesiar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Suku Makian yang tersebar di seluruh Maluku Utara. Dimana tradisi mudik/pulang kampung oleh masyarakat Makian perantauan yang pulang ke kampung halamannya setiap hari raya idul fitri maupun hajatan masing-masing desa di sekitar Teluk Powate.(Sumitro S. Syawal 2023)

Kedelapan, Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), Volume 3, Nomor 2, Tahun 2022. Peneliti Khairul Rasyid, Awang Darumurti yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Objek Wisata Bahari Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2021*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dapat dilihat dari 4 indikator, indikator pertama dialog atau komunikasi, indikator yang kedua aspek membangun kepercayaan dan kesepahaman antara pihak-pihak yang terkait, selanjutnya yang ketiga aspek legitimasi internal, keempat aspek komitmen bahwasannya masing-masing *stakeholder* sudah saling memahami antara satu sama lain.(Khairurrasyid 2022)

Kesembilan, Jurnal Reformasi, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2023. Peneliti Firman Firdaus, Rifky Afdillah, Adil Abdillah yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Probolinggo*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *governance* bukan hanya pemain tunggal dalam pengelolaan pariwisata namun ada beberapa aktor lain yang terlibat di dalamnya seperti masyarakat dan swasta dilihat

dari. Fokus dari penelitian ini adalah aspek pengelolaannya yang ternyata terdapat proses yang cukup kompleks dalam penentuan peran dan haknya.(Firdaus 2023)

Kesepuluh. Jurnal Publicuho, Volume 2, Nomor 4, Tahun 2022. Peneliti Adi Putra, Hasim As'ari, Ardianto yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata di Rupa Utara Kabupaten Bengkalis*. Hasil penelitian menunjukkan tentang strategi *Collaborative Governance Tourism* yang didalamnya terdapat permasalahan abrasi, sampah, dan aksesibilitas. Dalam Pelaksanaan *collaborative governance tourism* adalah *Principled Engagement, Shared Motivation* (Motivasi bersama) *Capacity for Join action* (Kapasitas untuk aksi bersama). Kendala dalam pelaksanaan *collaborative governance tourism* adalah keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi pembangunan pariwisata dilaksanakan secara simultan (Andi 2022).

Setelah melakukan *literatur review* posisi dari penelitian akan dilakukan (*standing position*) dalam penelitian adalah untuk mempertegas pendapat dari Peneliti Firman Firdaus, Rifky Afdillah, Adil Abdillah yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Probolinggo*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *governance* bukan hanya pemain tunggal dalam pengelolaan pariwisata namun ada beberapa aktor lain yang terlibat di dalamnya seperti masyarakat dan swasta yang dikemukakan menurut Ansell and Gash.

G. Kerangka Konseptual

1. Government

pemerintahan adalah tradisi alamiah ras manusia, ketika manusia bermasyarakat membentuk komunitas, desa, kerajaan atau negara-bangsa. Dunia, negara, kerajaan, daerah, desa, komunitas adat dapat disebut sebagai arena pemerintahan. Pemerintahan adalah perkara siapa memerintah apa dan siapa, bagaimana serta di mana. Dalam memahami “siapa” sebagai subjek yang memerintah perlu dipahami melalui idealisme dan realisme. Menurut idealisme konstitusional-demokratis, maka yang memerintah adalah pemerintah beserta parlemen yang hadir sebagai institusi pemegang kedaulatan rakyat. Namun, realisme melihat bahwa siapa yang memerintah tidak mesti pemerintah, tetapi secara de facto yang memerintah ada banyak subjek seperti negara, birokrat, konsultan, teknokrat, dan perangkat.

Pemerintahan berbicara relasi antara rakyat dan pemerintah, dengan negara dan warga (termasuk masyarakat). Pemerintah dalam masyarakat adalah milik rakyat, yang dibentuk cara politik oleh rakyat. Rakyat adalah konsep politik. Negara adalah milik warga. Warga adalah subjek hukum yang memiliki persamaan hak kewajiban terhadap negara. Pemerintah bukan sekadar penyelenggara negara. Pemerintah berbeda dengan negara. Birokrasi adalah the real state. Negara bersifat statis yang tidak berhubungan dengan demokrasi, melainkan berhubungan dengan

sentralisasi, birokratisasi, unifikasi dan koersi. Demokrasi berada pada ranah pemerintah, yang membuat pemerintah lebih dinamis dalam melakukan tindakan politik dan membuat hukum.(Yunanto 2021)

Dengan penjabaran diatas maka makna Government merupakan sebuah institusi maupun proses yang melibatkan pembentukan kebijakan, penegakan hukum, dan pengelolaan sumberdaya untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu masyarakat.

2. Kebijakan Publik

Tugas pemerintah adalah mengurus, mengelola, melayani warga. Dalam rangka yang dilakukan oleh pemerintah pertama-tama memutuskan untuk berbuat sesuatu: membuat kebijakan demi kemaslahatan masyarakat. Ketika istilah kebijakan dan publik digabungkan menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dianggap gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja. Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (governance), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana signifikansi

kebijakan publik sebagai komponen negara setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik (Eko Handoyo 2012).

Inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya. Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah, tetapi tidak akan efektif tanpa ada kebijakan publik yang dibuat. Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah dan karena kebijakan publik pada dasarnya merupakan kebijakan negara, maka kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, untuk memastikan bahwa tujuan yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh publik dapat tercapai Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis administratif saja, tetapi juga dimengerti sebagai sebuah persoalan politik. Kebijakan publik berkaitan dengan penggunaan kekuasaan, oleh karenanya kebijakan publik berlangsung dalam latar (setting) kekuasaan tertentu. Dalam konteks ini, berarti ada pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai.

3. Proses Collaborative Governance

A. Governance

Governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah *governance* dalam pengertian meta-governance yang tidak bias teknokratik-neoliberal. Jadi, *governance* dalam penelitian ini berbicara tentang “*governance without government*”, melainkan “*governance with government*”. Mengikuti Mazhab Timoho, maka secara sederhana, *governance* berbicara tentang interaksi atau relasi antara Pemerintah dengan pihak luar non pemerintah. Pemerintah tanpa interaksi dengan pihak luar akan menjadikan pemerintah otokratik birokratik seperti dunia perkantoran. Sebaliknya jika “*governance with government*” akan membuat pemerintahan seperti dunia pasar (Eko Yunanto 2021).

Governance berbicara tentang relasi antara pemerintah dan rakyat, dengan negara dan warga termasuk masyarakat (Eko Yunanto 2021). Interaksi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan objek wisata, pemerintah dan masyarakat dapat memainkan perannya masing-masing. Oleh karena itu pengelolaan objek wisata sangat memerlukan partisipasi dari aktor-aktor yang terlibat terutama pemerintah dan masyarakat.

Sutoro Eko menjelaskan lebih lanjut tentang pemerintahan sebagai tata kelola (*governance*). Tentang konsep yang dibangun dengan *anti-governance* sangat licin, konsep

governance dimaknai sebagai sebuah sudut pandang yang berbeda. Politik memahami *governance* sebagai relasi kuasa antara pemerintah dan rakyat, atau relasi relasi antar negara dan non-negara. Jika dipandang dari sudut administrasi, manajemen dan teknis, yakni *governance* diartikan sebagai pasar, jaringan, kerja sama, kemitraan, dan lain sebagainya (Eko Yunanto 2020).

Berdasarkan pengertian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa *governance*, berbicara tentang interaksi atau relasi antara Pemerintah dengan pihak luar non pemerintah. Tata kelola, merujuk pada serangkaian proses, pengelolaan dan peraturan suatu organisasi atau entitas. Ini mencakup pembuatan keputusan, implementasi kebijakan, dan pengawasan untuk mencapai *tujuan* yang diinginkan. Dalam konteks pemerintahan, istilah ini sering merujuk pada cara suatu negara atau lembaga pemerintah mengelola sumber daya dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

B. Collaborative Governance

Menurut Ansell dan gash dalam Dwi Alamsyah *Collaborative Governance* adalah pemerintahan yang disusun dengan melibatkan badan publik dan organisasi non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi musyawarah mufakat, dan ada pembagian peran untuk melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik, serta aset publik. Kolaborasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini (Alamsyah. 2019).

Ansell and Gash Collaborative governance (tata kelola pemerintahan kolaborasi) menjadi fenomena dan (trend) baru yang menarik diteliti. Istilah collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Yelvita 2022).

Menurut Balogh dalam Nadia, (2011:2) *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak (Tongkotow, Waworundeng, and Kimbal 2021).

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* merupakan suatu proses dari pemangku kepentingan (*government, civil society, private*) yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama dan

memecahkan suatu masalah bersama melalui interaksi formal dan informal. Maka dari itu ketiga aktor saling berperang penting dalam pengelolaan dan memiliki kekuasaan yang merata tidak berat sebelah yang muncul pada *Collaborative Governance*.

C. Proses Collaborative Governance

(Ansell n.d.) Penelitian ini menggunakan model *process collaborative governance* yang diungkapkan oleh Ansell and Gash (2007:558 -561) dalam mengetahui interaksi yang terjadi oleh setiap aktor dalam pengelolaan Kalurahan Wisata Wukirsari. Model ini digunakan karena dengan model ini banyak *collaborative governance* yang berhasil dilaksanakan. *Process collaborative governance* tersebut dibagi dalam 5 indikator sebagai berikut

1. *Face to Face Dialog*

Dialog tatap muka merupakan sebuah proses terjadinya pertemuan dari berbagai pihak pada tempat dan waktu yang sama dan terjadi sebuah *dialog* secara langsung dan interaktif untuk membahas mengenai kepentingan dan tujuan bersama. Bagian ini menjadi proses yang penting karena menjadi awal untuk memulai suatu *collaborative governance* maka dengan itu jika tidak terjadi pertemuan tatap muka maka *collaborative governance* tidak akan terjadi. *Collaborative governance* dalam pengelolaan desa

wisata dapat terjadi ketika Pokdarwis, pemerintah, dan pihak lain yang berhubungan bertemu.

2. *Commitment to Process*

Pada proses ini yang komitmen yang dilihat adalah komitmen atau kesepakatan bersama dalam melaksanakan proses untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Dalam hal ini berbagi komitmen membuat setiap pihak saling bergantung dalam menyelesaikan suatu masalah dan menentukan solusi bersama. Dalam proses ini Pokdarwis, pemerintah dan pihak lainnya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

3. *Trust Building*

Membangun kepercayaan bahwa pihak-pihak yang terlibat memiliki niat yang sama untuk mengikuti kebijakan terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Membangun kepercayaan diawali dengan membentuk komunikasi yang baik dengan seluruh pihak, khususnya dalam pengelolaan objek wisata embung potorono. Dalam hal ini, peserta kolaborasi harus memiliki kepercayaan dan kredibel dalam kaitannya dengan kepentingan bersama. Mitra kolaborasi harus memahami bahwa terdapat saling ketergantungan antara pihak yang menciptakan kerjasama yang berkelanjutan

4. *Shared Understanding*

Shared Understanding adalah memiliki pemahaman yang sama atau berbagi pemahaman dan pengertian bahwa forum ini memiliki tanggung jawab bersama untuk mengidentifikasi masalah bersama, hal ini ditentukan dengan nilai inti yang menjadi dasar proses ini terjadi. Hal tersebut dapat digambarkan pada tugas bersama, tujuan bersama, objektivitas bersama, visi yang sama, kesamaan ideologi yang mendasari, dll. berbagi pemahaman dapat mempengaruhi konsensus dalam menafsirkan suatu masalah. Dalam pengelolaan objek wisata setiap aktor diharapkan untuk berbagi pemahaman untuk memecahkan masalah yang terjadi dan juga dalam hal ini diharapkan untuk memiliki visi dan misi yang sama.

5. *Intermediate Outcomes*

Intermediate Outcomes merupakan pencapaian sementara dari proses kolaborasi yang telah berlangsung dan dapat memberikan dampak langsung

Dari penjelasan di atas mengenai *Process collaborative governance*, maka *collaborative governance* dalam penelitian ini dimaknai sebagai bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh aktor-aktor yang berperan dalam pengelolaan desa wisata. Dan terdapat lima proses dalam menuju suatu *collaborative governance*

dan kelima proses tersebut memiliki keterkaitan yang tidak boleh terpisahkan. Jika terdapat proses yang tidak terlaksana maka dikatakan bahwa model *collaborative governance* Ansell and Gash tidak berhasil diterapkan.

4. Kepariwisata

pariwisata merupakan bidang yang multidimensional, melibatkan dan bersinggungan dengan berbagai sektor dan pelaku. Sepintas, kata pariwisata dan pariwisata sepertinya memiliki arti yang sama. Namun jika dilihat lebih dalam, maka arti kata pariwisata lebih luas dari pada kata pariwisata. Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Ada definisi yang berkaitan dengan pariwisata dengan memberikan pengertian sebagai berikut, yaitu: Pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan tempat wisata yang dikunjungi untuk sementara waktu.

Pariwisata adalah sarana untuk memulihkan kesehatan moral seseorang dan membangun kembali keseimbangan emosional seseorang. Mungkin juga pariwisata digunakan sebagai cara untuk menemukan kembali diri sendiri. Ini dimungkinkan ketika seseorang berada di lingkungan yang berbeda. Situasi ini hanya mungkin terjadi saat bepergian, karena perjalanan dapat

menimbulkan perasaan bahwa orang tersebut secara psikologis telah dipindahkan dari lingkungan perumahannya sendiri. Maka dengan demikian, rasa cemas bercampur rasa ingin tahu dan cinta akan pengalaman baru dalam dirinya. Masyarakat juga mulai mengaitkan berbagai tema lingkungan dalam berbagai kegiatan industri pariwisata dari sisi penawaran dan sisi permintaan yang dapat meningkatkan usaha pariwisata. Kegiatan pariwisata juga memberikan efek positif yaitu dapat memberikan manfaat dalam hal pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengurangi pengangguran, membuka lapangan usaha besar dan kecil, memproduksi oleh-oleh khas daerah baik kerajinan lama/tradisional maupun modern, meningkatkan pendapatan dan kemajuan daerah. dan juga meningkatkan devisa suatu negara. (Marlina and Hidayati 2023)

a. Objek wisata

Pariwisata adalah kegiatan yang melibatkan perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan rekreasi, hiburan, atau bisnis, makna pariwisata mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya. Secara ekonomi pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan bagi suatu daerah.

Objek Wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Objek

Wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Objek wisata dapat berupa wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau berupa objek bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan lain-lain. pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau di luar negeri (meliputi pendiaman orang orang dari daerah lain) untuk mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan tetap (Syafitri and Adnan 2021).

Pariwisata merupakan sektor potensial yang dapat dikembangkan sebagai salah-satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berorientasi pada perkembangan wilayah. Bertumpu kepada

masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi (Mita 2023).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa objek wisata atau pariwisata merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh suatu daerah yang bisa menarik minat pengunjung dari berbagai daerah baik itu wisatawan lokal maupun Internasional. Selain sebagai destinasi wisata, pariwisata yang merupakan sebuah potensi yang dimiliki suatu wilayah atau daerah juga dapat menambah pendapatan asli daerah tersebut (PAD) dan bisa menambah penghasilan ekonomi masyarakat sekitar.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk memecahkan masalah atau mendapatkan pemahaman yang sistematis dan terorganisir tentang suatu fenomena. Metode penelitian membantu mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian serta memvalidasi temuan. Tujuannya juga termasuk pengembangan teori, dan memberikan solusi untuk masalah yang diidentifikasi.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penjelasan terkait metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskripsi

Penelitian kualitatif deskriptif adalah salah satu dari jenis metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif deskriptif meneliti tentang kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif (Rusli and Pendidikan 2014).

Sugiono (2013:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Digunakan pada penelitian objek yang alamiah atau naturalistik, disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya penelitian ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya (Prof.Dr.Sugiyono 2013).

Sugiono (2013:24) menjelaskan lebih lanjut penelitian kualitatif digunakan untuk memahami interaksi sosial, karena interaksi yang kompleks dapat diurai kalau peneliti melakukan penelitian dengan cara ikut berperan serta, wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Dengan demikian akan ditemukan pola-pola hubungan yang jelas.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Padukuhan Salakan, Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan waktu kurang lebih satu bulan lamanya, yaitu pada bulan November 2023 s/d Desember 2023.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi fokus analisis, mereka adalah partisipan atau informan yang memberikan wawasan, pengalaman. Subjek penelitian dapat mencakup orang-orang dalam berbagai konteks, seperti anggota kelompok, pekerja organisasi.

Subjek dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintahan Kalurahan Potorono
2. Pokdarwis
3. Kelompok Pengelola Embung Potorono (masyarakat)

Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, Arikunto dalam Rahmadi (2011:65) teknik ini disebut sebagai sampel bertujuan. Teknik penarikan *purposive* dilakukan dengan cara menentukan kriteria khusus atau pertimbangan karakteristik tertentu terhadap sampel atau subjek penelitian yang akan diteliti, terutama orang-orang yang dianggap ahli di bidangnya atau paling mengetahui suatu peristiwa tertentu dan sebagainya (Rahmadi 2011).

Tabel 1. 1 Daftar Informan

No	Nama	Umur	Jabatan	Pendidikan	Jenis kelamin
1.	Prawanta	53	Lurah Potorono	S 1	Laki-Laki

2.	Toriq Fauzi	55	Ulu-Ulu Potorono	S 1	Laki-Laki
3.	Bachron	51	Ketua Pengelola	SMA	Laki-Laki
4.	Sumarjono	57	Anggota pengelola	SMA	Laki-Laki
5.	Sumarwinto	53	Carik Potorono	SMA	Laki-Laki
6.	Munir	39	Ketua Pokdarwis	S 1	Laki-Laki

4. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah kolaborasi Pemerintah Kalurahan Potorono dalam pengelolaan objek wisata Embung Potorono

5. Teknik Pengumpulan Data

Sugiono (2013:225) dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam dan dokumentasi.

a. Observasi

Sugiono (2013:145) observasi adalah kegiatan yang melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

b. Wawancara

Sugiono (2013:137) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam

c. Dokumentasi

Sugiono (2013:240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan (catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan) dokumen yang berbentuk gambar (foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain) dokumen yang berbentuk karya, seperti karya seni berupa (patung, gambar, film, dan lain-lain)

6. Teknik Analisis Data

Sugiono (2013:245) analisis data merupakan proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan

hipotesis data yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya di cairkan lagi secara berulang-ulang. (Sugiono 2013)

a. Reduksi Data

Sugiono (2013:247) reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temannya. Mekan dengan itu reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

b. Penyajian Data

Sugiono (2013:249) penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan melibatkan merangkum temuan utama dari data dan mengidentifikasi pola atau atau temuan yang muncul. Ini membantu menyusun gambar yang jelas tentang aspek-aspek penting dari penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kalurahan Potorono

Kalurahan Potorono merupakan salah satu Kalurahan yang terletak di kapanewon Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Sejarah Kalurahan Potorono ini dibentuk pada tahun 1946, nama Potorono merupakan pemberian dari lurah pertama H.M. Cahmim. Desa Potorono sendiri pada awalnya terdiri dari 3 Kalurahan yaitu:

1. Kelurahan Mayungan
2. Kelurahan Mertosanan Wetan
3. Kalurahan Balong

Dari ketiga kelurahan tersebut, pada tahun 1946 digabung menjadi satu dengan nama Potorono, di ambil nama Potorono karena Potorono merupakan wilayah Pedukuhan Kelurahan lama atau yang tertua (Kelurahan Mayungan). Pada masa bhakti ke 33 Tahunnya, H.M. Cahmim meninggal dan mengakhiri masa jabatannya sebagai lurah Desa Potorono pada Tahun 1979 yang kemudian posisinya digantikan sementara oleh bagian sosial yaitu Sastro Tinoyo. Setelah 4 Tahun puncak kepemimpinan Kalurahan Potorono diisi oleh bagian sosial, akhirnya dilaksanakan kembali pemilihan Lurah yang baru. Terpilih H.M. Sahrudin Sanani sehingga namanya tercatat menjadi lurah ke-2 Desa Potorono serta membawa Potorono dalam periode yang baru di bawahnya. Sekarang Desa Potorono Sudah sangat maju bisa dilihat dari banyaknya potensi dan objek wisata yang berada di daerah Potorono.

Adapun saat ini Kalurahan Potorono terbagi menjadi 9 (sembilan) wilayah padukuhan yaitu:

Tabel 2. 1 Nama Padukuhan dan Jumlah Rt

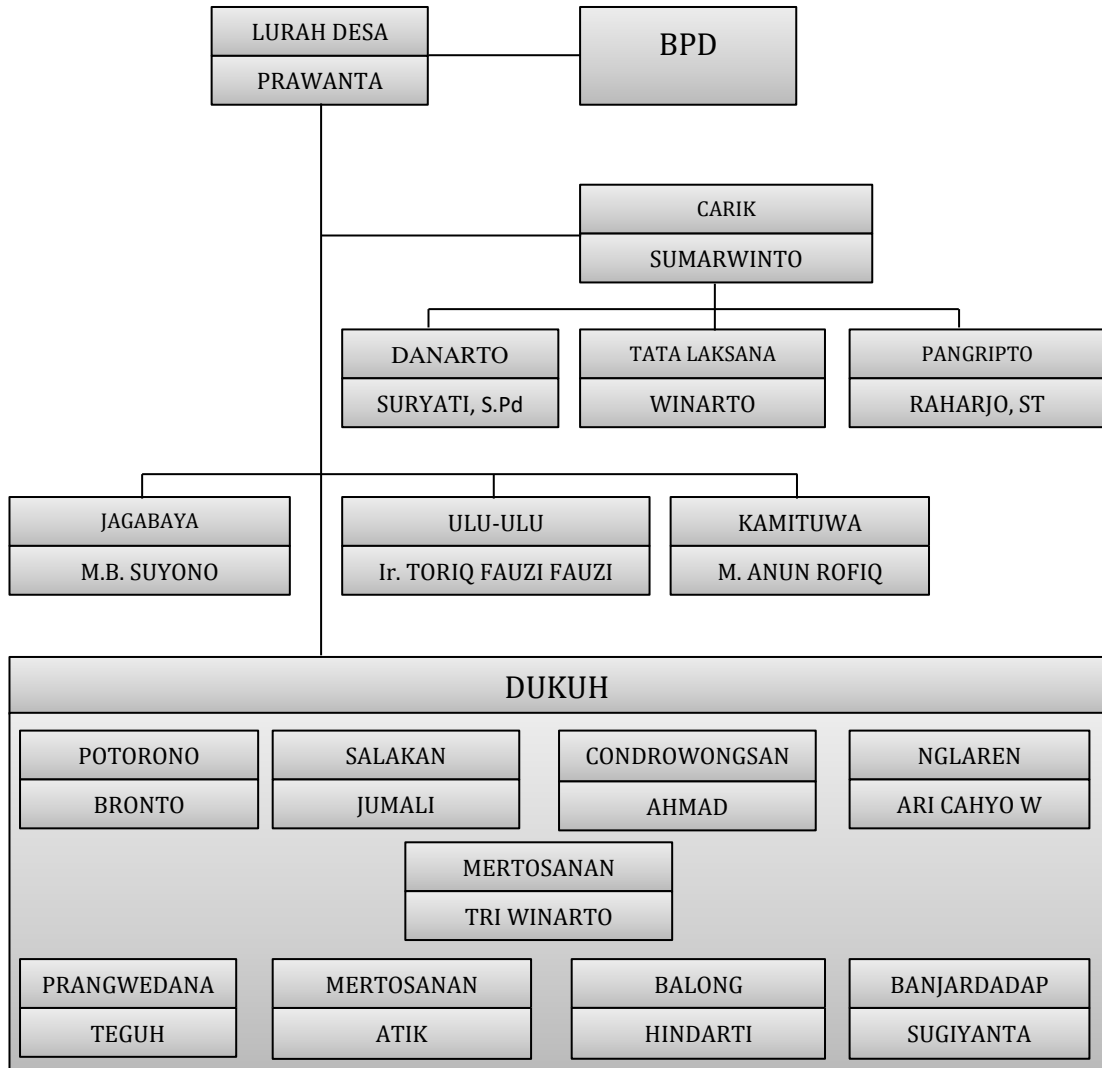
NO	Nama Padukuhan	Jumlah RT
1.	Balong Lor	8
2.	Banjardadap	9
3.	Condrowangsan	10
4.	Mertosanan Kulon	16
5.	Mertosanan Wetan	12
6.	Nglaren	6
7.	Potorono	9
8.	Prangwedanan	5
9.	Salakan	10

Sumber: Website Kalurahan Potorono pada Desember 2023

Wilayah Desa Potorono yang termasuk dalam kota Banguntapan secara Geografis terletak diantara $110^{\circ} 25' 52''$ BT dan $7^{\circ} 50''$ LS, atau sebelah Timur Laut Kota Yogyakarta dengan jarak kurang-kurang 10 km. Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, mempunyai luas 435,45 Ha, terdiri dari (9) sembilan Padukuhan dan 83 (delapan puluh tiga) RT.

Struktur Pengurus Kalurahan Potorono

Sumber: Papan Informasi Kalurahan Potorono



Tugas dan Fungsi
Jabatan Kalurahan Potorono

- Lurah Desa : Sebagai kepala pemerintahan Kalurahan yang memimpin jalannya atau penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kalurahan. (melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat, dan lembaga lainnya, menyelenggarakan pemerintahan Desa/Kalurahan)
- Carik : Sebagai unsur pimpinan sekretaris Desa, membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan.(melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi, melakukan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum, melaksanakan urusan keuangan; pengurusan administrasi keuangan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD. melaksanakan urusan perencanaan; menyusun rencana APBDesa

- Tata Laksana : Berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris, bertugas membantu sekretaris Desa/Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris Desa atau Kepala Desa
- Danarta : Bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan (pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya; serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris Desa atau Kepala Desa)
- Pangripta : Bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan (menyusun rencana APBDes, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, penyusunan laporan, pelaksanaan fungsi

lain yang diberikan sekretaris Desa atau Kepala Desa)

Jagabaya : Bertugas sebagai membantu Kepala Desa/Lurah sebagai tugas operasional. (manajemen tata praja Pemerintahan, penyusunan rancangan regulasi Desa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa, penataan dan pengelolaan wilayah, pendataan dan pengelolaan profil Desa, pemantauan kegiatan sosial politik di Desa, penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pemberian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya, dll)

Ulu-Ulu : Bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas Operasional. (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat, penginventarisir dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan

administrasi pembangunan tingkat Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Desa, pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna, penyiapan konsep rencana peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa serta peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya, pelayanan kepada masyarakat, dll)

Kamituwa : Bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas Operasional (penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, penyiapan konsep rencana peraturan desa sesuai dengan bidang tugasnya, dll)

- Dukuh/Kepala Dusun : Sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa/Lurah dalam wilayah kerjanya. Dukuh mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya (pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah kerjanya, penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya, pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, dll)
- BPD : membahas dan menyepakati rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis mencakup berbagai faktor fisik dan lingkungan yang mempengaruhi suatu wilayah. Ini melibatkan elemen seperti topografi, iklim, hidrografi, vegetasi, dan keadaan alamiah lainnya.

a. Luas wilayah

Tabel 2. 2 Luas wilayah

NO	PADUKUHAN	LUAS
1.	Potorono	42,25 Ha
2.	Prangwedanan	38,29 Ha
3.	Salakan	60,30 Ha
4.	Condrowangsan	42,72 Ha
5.	Nglaren	50,95 Ha
6.	Mertosanan Wetan	53,59 Ha
7.	Mertosanan Kulon	60,44 Ha
8.	Banjardadap	55,89 Ha
9	Balong Lor	31,03 Ha
JUMLAH		435,46 Ha

Sumber Website Kalurahan Potorono pada Desember 2023

Wilayah Kalurahan Potorono mempunyai luas wilayah sejumlah 435,46 Ha, padukuhan paling luas pertama adalah padukuhan Mertosanan Kulon kemudian dengan luas wilayah 60,44 Ha kemudian wilayah terluas kedua adalah padukuhan salakan dengan luas 60,30 Ha,

kemudian wilayah di Kalurahan Potorono paling kecil adalah Balong Lor dengan luas wilayah 31,03 Ha.

Adapun batas wilayah Kalurahan Potorono adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Baturetno, Banguntapan Bantul dan Kalurahan Sendangtirto, Berbah, Sleman
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Sitimulyo, Piyungan, Bantul
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Jambidan, Banguntapan, Bantul dan Kalurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Baturetno, Banguntapan, Bantul dan Kalurahan Wirokerten, Banguntapan, Bantul

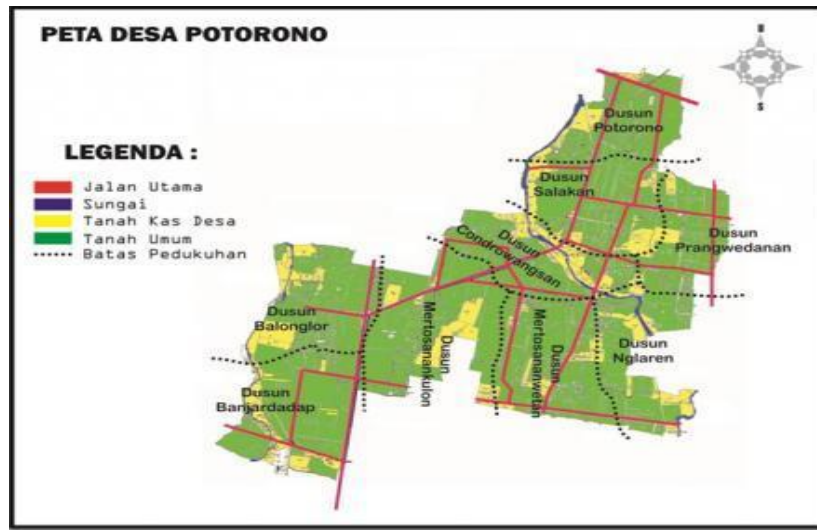
b. Klimatologi dan Hidrologi di Desa Potorono:

Tabel 2. 3 Klimatologi dan Hidrologi

1.	Ketinggian Tanah dari Permukaan	60-80 M
2.	Banyak curah hujan	2.233 mm/thn
3.	Topografi	Dataran Rendah
4.	Suhu udara rata-rata	22-32° C
5.	Jarak dari pusat Kecamatan	2 Km
6.	Jarak dari ibukota Kabupaten	15 Km
7.	Jarak dari ibukota Provinsi	9 Km
8.	Jarak dari ibukota negara	500 Km

Sumber Website Kalurahan Potorono pada Desember 2023

Gambar 1.1 Peta Desa Potorono



Peta Desa Potorono

Sumber Website Kalurahan Potorono pada Desember 2023

Wilayah yang cukup luas dari Kalurahan Potorono mempunyai banyak sumber daya alam, maupun sumberdaya manusia, hal itu merupakan potensi yang cukup besar yang dimiliki oleh Kalurahan Potorono yang nantinya bisa dimanfaatkan kegunaannya untuk kesejahteraan bersama.

2. Keadaan Demografi

Keadaan demografi adalah analisis statistik dari populasi manusia, yang mencakup berbagai aspek seperti jumlah penduduk, pertumbuhan populasi, distribusi usia. Pada dasarnya demografi merupakan ilmu pencatatan rakyat.

a. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Usia

Jumlah masyarakat di Kalurahan Potorono berdasarkan usia merupakan kajian demografis yang mencatat dan mengumpulkan

serta mengelompokkan masyarakat Kalurahan Potorono berdasarkan rentang usia.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	KELOMPOK USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1.	0-14 Tahun (Belum Produktif)	1.605	1.512	3.117
2.	15-64 Tahun (Produktif)	4.679	4.727	9.406
3.	> 65	422	522	944
JUMLAH		6.700	6.771	13.471

Sumber: Data Kependudukan DIY Kab. Bantul Semester II Tahun 2021,

Diakses Melalui Website <http://kependudukan.jogjaprovo.go.id/pada-Desember-2023>

Pada tabel 2.4 di atas menjelaskan atau mengidentifikasi data penduduk Kalurahan Potorono berdasarkan usia. Pada tabel yang tertera diatas dapat kita ketahui bahwa masyarakat Kalurahan Potorono sebagian besar berada pada usia 15-64 Tahun dimana pada usia ini merupakan usia produktif yakni sebanyak 9.406 jiwa. Dengan demikian disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yang menjalankan atau mengelola objek wisata merupakan kelompok usia produktif.

b. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Agama

Data jumlah masyarakat berdasarkan agama penting untuk memahami keragaman agama dalam suatu wilayah. Informasi ini membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam perencanaan kebijakan yang bersifat multikultural, memastikan keadilan sosial, dan mendukung kebebasan beragama.

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Islam	6.518	6.578	13.096
2.	Kristen	80	80	160
3.	Katholik	90	103	193
4.	Hindu	4	5	9
5.	Budha	8	5	13
6.	Konghucu	-	-	-
7	Aliran Kepercayaan	-	-	-
JUMLAH		6.700	6.771	13.471

Sumber Data Kependudukan DIY Kab. Bantul Semester II Tahun 2021,

Diakses Melalui Website <http://kependudukan.jogjaprovo.go.id/pada>
[Desember 2023](#)

Berdasarkan tabel 2.5 diatas yang berisikan jumlah masyarakat Kalurahan Potorono berdasarkan agama yang dipercayai. Dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh masyarakat Kalurahan Potorono memeluk agama Islam, hal itu dikarenakan sebanyak 13.096 jiwa yang beragama Islam. Sementara itu agama dengan penganut terbanyak kedua di Kalurahan Potorono adalah agama Khatolik dengan jumlah penganut 193 jiwa, kemudian dilanjutkan dengan agama Kristen dengan jumlah penganut 160 jiwa, yang keempat ada agama konghucu dengan jumlah 13 jiwa selanjutnya di posisi kelima dianut oleh agama Hindu dengan jumlah 9 jiwa. Masyarakat Kalurahan Potorono menganut lima agama yang dipercayai oleh masyarakat Potorono yaitu, Islam, Khatolik, Kristen, Hindu dan Budha. Sementara itu untuk agama Konghucu dan Aliran kepercayaan tidak ada.

c. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Mata Pencaharian

Data ini membantu pemerintah dan pelaku ekonomi untuk mengidentifikasi sektor-sektor pekerjaan yang dominan, memfasilitasi pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	WANITA	L + P
1.	Rumah Tangga	0	987	987
2.	Pelajar/ Mahasiswa	904	881	1.785
3.	Pensiunan	107	44	151
4.	Belum Bekerja	117	136	253
5.	ASN	168	175	343
6.	TNI	48	3	51
7.	Polri	47	6	53
8.	Pejabat Negara	1	1	2
9.	Buruh/ Tukang Berkeahlian Khusus	1.499	1.156	2.655
10.	Sektor Pertanian/ Peternakan/ Perikanan	241	278	519
11.	Karyawan BUMN/BUMD	39	21	60
12.	Karyawan Swasta	1.032	773	1.805
13.	Wiraswasta	817	721	1.538
14.	Tenaga Medis	12	31	43
15.	Pekerja Lainnya	63	46	109
JUMLAH		5.095	5.259	10.354

Sumber Data Kependudukan DIY Kab. Bantul Semester II Tahun 2021,

Diakses Melalui Website <http://kependudukan.jogjaprovo.go.id/pada>

[Desember 2023](#)

Dilihat berdasarkan tabel 2.6 di atas yang mengenai jumlah penduduk Kalurahan Potorono berdasarkan jenis mata pencaharian dapat kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kalurahan Potorono berstatus sebagai Buruh/ tukang berkeahlian khusus dengan jumlah 2.655 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk terbanyak kedua berprofesi sebagai karyawan swasta sebanyak 1.805 jiwa, lanjut peringkat ketiga jumlah penduduk ditempati dengan profesi pelajar dan mahasiswa dengan jumlah 1.785 jiwa.

d. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan memberikan pandangan yang mendalam tentang struktur kecerdasan suatu masyarakat. Data ini esensial untuk perencanaan pendidikan, memungkinkan pengembangan program-program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, serta mendukung upaya mencapai tingkat literasi dan keterampilan yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Jumlah masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan ini juga bisa untuk mengetahui seberapa sadar masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang harus ditempuh oleh setiap orang guna kepentingan mas hidupnya mendatang, dan untuk menghadapi bagaimana perkembangan zaman yang kian melaju pesat.

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1.	Belum/ Tidak Sekolah	1.317	1.306	2.623
2.	Belum Tamat SD	609	582	1.191
3.	Tamat SD	1.095	1.236	2.331
4.	Tamat SMP/MTs	955	933	1.888
5.	Tamat SMA/SMK/MA	1.883	1.754	3.637
6.	Diploma I/II	42	50	92
7.	Diploma III	123	165	288
8.	Diploma IV/ Strata I	590	678	1.268
9.	Strata II	80	59	139
10.	Strata III	6	8	14
JUMLAH		6.700	6.771	13.471

Sumber Data Kependudukan DIY Kab. Bantul Semester II Tahun 2021,

Diakses Melalui Website <http://kependudukan.jogjaprovo.go.id/pada>
[Desember 2023](#)

Berdasarkan tabel 2.7 diatas yang berisikan jumlah penduduk Kalurahan Potorono berdasarkan jenjang pendidikan dapat kita ketahui bahwa mayoritas atau sebagian besar masyarakat Kalurahan Potorono memiliki tingkat pendidikan sampai lulusan SMA/ SMK/ MA dengan jumlah 3.637 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kalurahan Potorono sudah sadar bahwa pendidikan itu merupakan hal yang penting. Sementara itu jumlah terbanyak kedua adalah tamatan SD yaitu sebanyak 2.331

B. Deskripsi Objek Wisata Embung Potorono

Embung Potorono atau Telaga Desa Potorono ini berawal dari Tahun 2017, dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memberikan bantuan kepada Kalurahan Potorono berwujud satu proyek Telaga Desa dengan anggaran 1,9 M telaga Desa atau Embung Potorono ini terletak di padukuhan Salakan. Dipilihnya pembangunan Embung Potorono di Padukuhan Salakan ini bukan asal pilih tetapi juga sudah dilihat dari beberapa aspek dan tanah kosong yang kurang produktif seperti ditanami tidak tumbuh dengan baik.

Lalu pemerintah Kalurahan Potorono berpikir dan berencana untuk mengubah tanah kosong itu menjadi embung, yang pada awalnya untuk kestabilan air/ketersediaan air dan nantinya ketersediaan air ini bisa dimanfaatkan oleh banyak kalangan masyarakat. Seiring berjalannya waktu embung ini berubah menjadi destinasi wisata yang cukup populer.

Objek wisata embung Potorono berupa kolam bendungan sungai serupa telaga dengan bentuk lonjong. Lokasinya yang berada di pinggir sungai dengan pepohonan rindang, menjadikan embung Potorono sebagai tempat wisata yang sangat cocok untuk menghabiskan waktu dengan bersantai dan bersantai bersama keluarga. Saat pagi atau sore hari, semburat cahaya matahari yang memantul di air kolam membuat suasana Embung Potorono semakin indah dengan kehadiran ratusan ikan berbagai warna yang berenang di dalam embung. Serta mempunyai beragam fasilitas berikut fasilitas yang ada di Embung Potorono:

1. Fasilitasi /Sarana dan Prasarana Objek Wisata

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan suatu tempat wisata. Dengan adanya sarana prasarana yang mendukung maka akan memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata Embung Potorono dan selain untuk kenyamanan pengunjung tempat wisata tentu hal ini juga akan membuat kenyamanan bagi masyarakat Kalurahan Potorono.

Berikut beberapa sarana dan prasarana yang tersedia di Embung Potorono untuk memajukan tempat wisata:

a. Akses Jalan

Akses jalan merupakan salah satu hal yang krusial yang sangat penting di berbagai aspek untuk peningkatan ekonomi, jalan mulus juga menjadi nilai tambah untuk para wisatawan dalam mendatangi suatu objek wisata. Maka dengan itu jalan merupakan pertimbangan para wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata, dengan didukungnya jalan yang mulus ke Embung Potorono sudah menjadikan objek wisata ini mudah di akses untuk menuju lokasi

b. Tempat Parkir

Selain jalan tempat parkir juga merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pengelola objek wisata, tempat parkir yang luas bisa menampung kendaraan beroda empat di embung Potorono juga sudah tersedia dimana dengan

adanya tempat parkir yang luas ini wisatawan tidak perlu repot-repot mencari tempat parkir dan dengan tempat parkir yang luas ini bisa menampung wisatawan dalam jumlah yang cukup besar.

c. Kapal Berbentuk Hewan

Kapal berbentuk hewan ini disewakan untuk menelusuri embung Potorono, kapal ini mempunyai struktur yang inovatif dan unik. Desainnya mencerminkan kreativitas, dengan penekanan pada keindahan dan fungsionalnya. Dek kapal yang cukup luas memberikan ruang yang cukup untuk pengunjung sampai berjumlah empat orang, untuk menikmati pemandangan di sekitar embung, kapal berbentuk hewan ini dioperasikan dengan cara dikayuh oleh penumpang, harga yang dikeluarkan untuk naik kapal ini juga relatif murah dari 5.000-10.000 ribu rupiah saja

d. Rute Jogging

Selain menyediakan suasana yang santai Embung Potorono juga menyiapkan rute untuk masyarakat dan wisatawan yang suka berolahraga seperti berlari dan jalan santai memutar di sekitaran Embung Potorono. Sehingga menjadikan embung Potorono di pagi dan sore hari sangat cocok untuk bersantai dan berolahraga.

e. Panggung

Tempat wisata Embung Potorono juga menyediakan hiburan berupa nyanyian atau karaoke dari penyanyi loka dan jika ada pengunjung yang mau menyumbang lagu juga diperbolehkan, hiburan ini dilakukan di sebelah selatan embung potorong dan dilakukan di atas panggung untuk melakukan konser atau hiburan musik ini.

f. Mushola

Jika wisatawan ingin melaksanakan ibadah tidak perlu khawatir karena di embung Potorono menyediakan tempat ibadah sehingga wisatawan bisa merasa lega dan tidak khawatir ketika tertinggal ibadah ketika diperjalanan dikarenakan di tempat wisata embung Potorono sudah menyediakan tempat ibadah.

g. Taman Bermain

Wisata embung potorong bukan hanya untuk orang dewasa saja namun juga bisa mencakup ke seluruh kalangan dari anak-anak, anak muda, orang dewasa dan bahkan sampai orang tua, jadi ketika orang tua membawa anaknya tidak perlu khawatir wisata embung Potorono juga menyiapkan tempat bermain seperti bandulan, perosotan, dan rumah berbentuk istana dari balon.

h. Rumah Makan

Jika berkunjung ke tempat wisata sudah sangatlah umum jika di tempat wisata tersebut selalu ada yang jualan makanan, di wisata embung Potorono juga menyediakan banyak tempat makan, dari yang menengah ke bawah sampai menengah ke atas, dan rumah makan juga menyediakan makanan khas Jawa.

i. Kamar Mandi

Kamar mandi mempunyai peran atau fungsi untuk memberikan fasilitas kebersihan dan kenyamanan bagi pengunjung. Kamar mandi dapat digunakan untuk membuang hajat kecil maupun hajat besar, fasilitas kamar mandi yang baik dapat meningkatkan pengalaman pengunjung dan memastikan lingkungan wisata tetap bersih dan terjaga

j. Gazebo

Gazebo berperan penting sebagai oase relaksasi, dengan desain yang seringkali menarik, gazebo memberikan tempat istirahat yang nyaman bagi pengunjung. Terletak pada lokasi strategis, gazebo juga menawarkan pemandangan indah di sekitar objek wisata, menciptakan pengalaman berlibur yang lebih mendalam.

2. Event-Event/Kegiatan

Event atau kegiatan adalah suatu peristiwa yang direncanakan dan diorganisir untuk mencapai tujuan tertentu, kegiatan yang berada di embung Potorono berupa:

c. Panen Raya

Panen Raya adalah kegiatan rutin yang dilakukan di telaga desa atau embung Potorono dimana panen raya ini dibuka untuk umum. Panen raya ini berupa lomba pemancingan yang dilakukan di embung potorono dimana nanti aturannya setiap peserta berhak mendaftar dengan nominal tertentu dan hanya diperbolehkan menggunakan satu pancing saja. Nanti hasil dari pancingan boleh dibawa pulang dan memperebutkan hadiah yang telah disediakan.

b. Pasar Malam

Pasar malam ini serupa dengan sekaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta namun yang membedakan pasar malam dengan sekaten adalah pasar malam hanya dilakukan dengan kurun waktu yang sangat singkat hanya dilakukan dua malam saja. Hal ini merupakan salah satu event yang diselenggarakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

c. orkes

orkes ini berupa pertunjukan nyanyian yang dilakukan rutin setiap hari sabtu dan minggu saja. Orkes ini

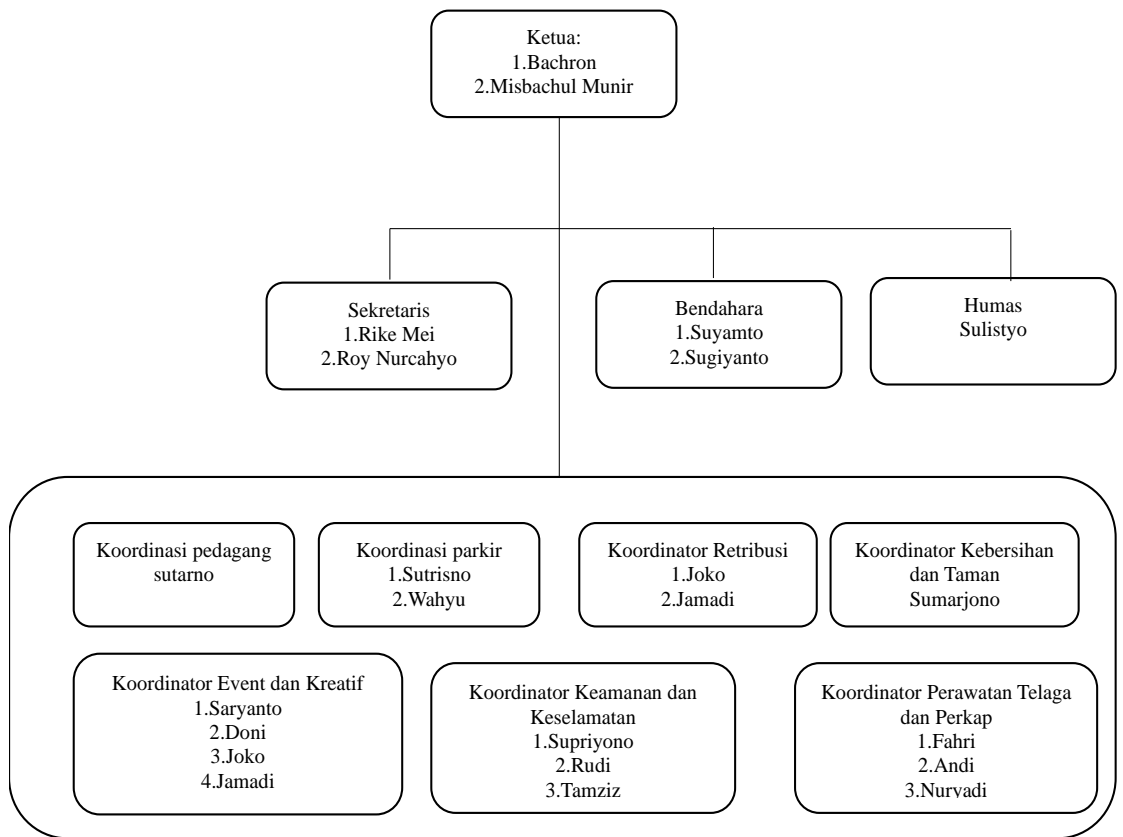
bertujuan untuk menghibur pengunjung yang datang ke embung Potorono, orkes ini menyediakan penyanyi dan serta keyboardis untuk mengiringi irama nada yang dinyanyikan, selain untuk menghibur pengunjung bagi pengunjung yang ingin unjuk kebolehannya dalam hal bernyanyi sangat dibolehkan sekali dan hal ini tidak dipungut biaya.

3. Pengelolaan Objek Wisata Embung Potorono

Pengelolaan Objek wisata embung potorono ini menerangkan siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pengelolaan:

a. Kelompok Pengelola Objek Wisata

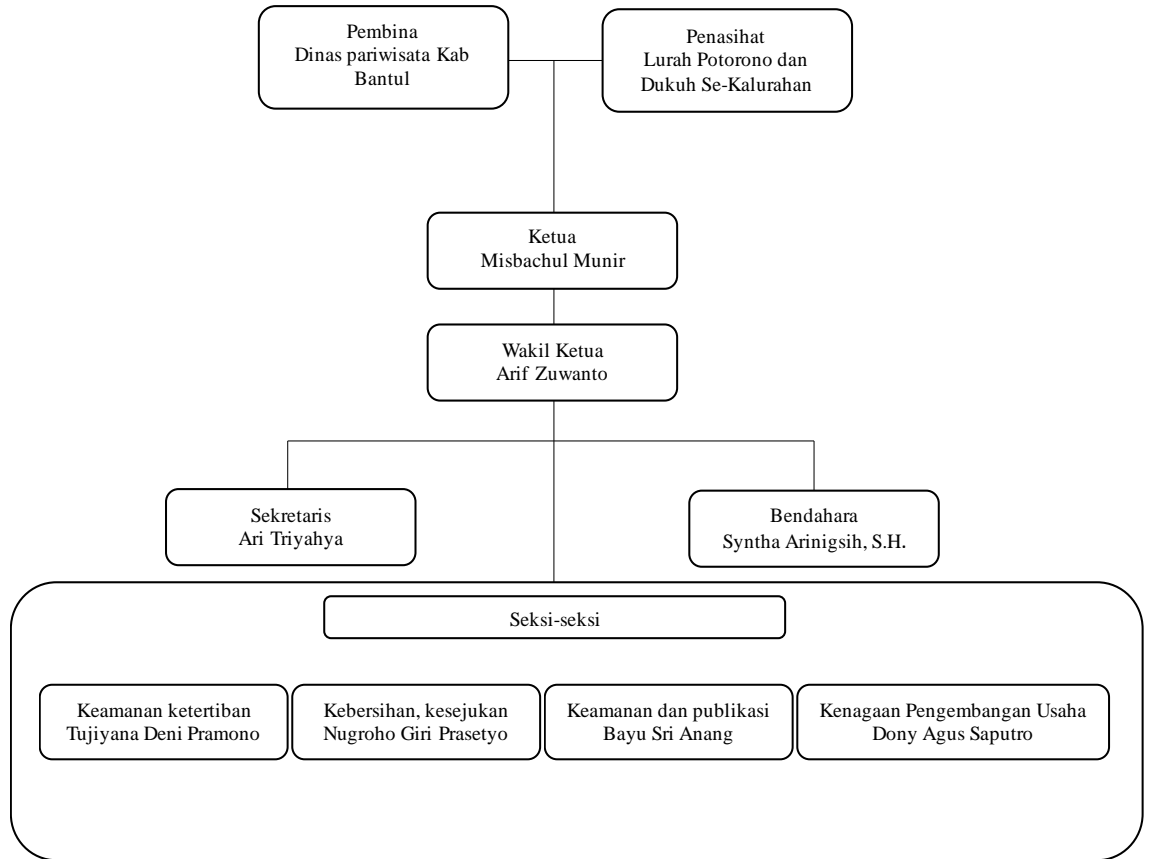
Kelompok pengelola objek wisata merupakan salah satu yang menjadi pengelola di objek wisata embung Potorono adalah pengelola objek wisata itu sendiri yang didalamnya terbentuk dari masyarakat sekitar. Pengelola objek wisata ini mempunyai peranan yang penting pada pengelolaan embung potorono . karena kelompok pengelola ini yang terjun langsung di lapangan untuk mengelolanya. Adapun susunan organisasinya sebagai berikut berdasarkan SK Lurah nomor 76 tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Wisata “Telaga Desa Potorono”:



b. Pokdarwis

Keberadaan pokdarwis sebagai suatu lembaga lokal yang terdiri atas pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan destinasi wisata yang berada di Kalurahan Potorono. Pokdarwis menjadi lembaga yang bergerak swadaya dan melakukan pengembangan pariwisata berdasarkan potensi lokal dan kreativitas yang dimiliki oleh Kalurahan Potorono. Susunan Pengurus Pokdarwis berdasarkan SK Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pengurus Pokdarwis Kalurahan Potorono

Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Periode 2021-
2026:



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab sebelumnya bahwa fokus penelitian pada proses *Collaborative Governance* pada pengelolaan objek wisata embung Potorono menurut Ansell and Gash, dan pemberdayaan Pokdarwis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Process collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata embung Potorono sudah berjalan cukup baik karena sudah tercapainya seluruh indikator seperti: Penyamaan persepsi, *Face to Face Dialog*, *Commitment to Process*, *Trust Building*, *Shared Understanding*, *Intermediate Outcomes*. Kenapa belum dikatakan sempurna secara total, karena dari indikator *Trust Building* masih belum sempurna masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan Pemerintah datang untuk mengambil pendapatan dari pengelolaan embung Potorono.
2. Faktor pendukung dalam proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan objek wisata embung Potorono adalah faktor pemahaman bersama terhadap peran dari masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi. Mereka sudah saling paham dengan tugas dan fungsinya. Kemudian yang menjadi faktor penghambat proses *collaborative Governance*, masih ada sebagian masyarakat dari kelompok pengelola yang belum bisa saling percaya, walaupun hanya sebagian kecil namun ini nantinya akan menjadi faktor penghambat dalam kolaborasi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang *Collaborative Governance* dalam pengelolaan objek wisata embung Potorono peneliti menyarankan kepada: kelompok pengurus embung Potorono. Kelompok pengurus harus lebih saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Karena jika kepercayaan bersama tidak dapat tercapai maka hal itu akan menghambat proses kolaborasi dalam pengelolaan objek wisata.

DAFTAR ISI

- Alamsyah, Dwi, Nuryanti Mustari, Rudi Hardi, and Ansyari Mone. 2019. "Collaborative Governance Dalam Mengembangkan Wisata Edukasi Di Desa." *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 04(02): 112–27. <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik>.
- Andi, Putra. 2022. "Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Rupert Utara Kabupaten Bangkali." 5(4): 1149–61.
- Ansell, chris and Alison Gash. "Collaborative Governance in Theory and Praticce." *journal of public administration research and theory*.
- Eko Yunanto, Sutoro. 2020. "Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa Pada Hukum, Dan Enggan Pada administrasi." *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)* 1(1): 1–24.
- Firdaus, Firmaan. 2023. "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Probolinggo." 13(Juni): 162–71.
- Khairurrasyid, Awang. 2022. "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Objek Wisata Bahari Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 3(2): 75–91.
- Kusumawati, Rini, Supri Hartono, and Dida Rahmadanik. 2023. "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Desa Wisata Pelang Kabupaten Tuban." 22: 109–16.
- Lestari, Wida et al. 2022. "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Alam Green Canyon Di Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang." *Ilmu Wahana Pendidikan* 8(7).
- Marlina, Leni, and Nurul Hidayati. 2023. "Peran Pariwisata Berbasis Industri Dalam Pengembangan Bisnis Di Indonesia Pendahuluan." 1(01): 31–40.
- Mita, Mayarni. 2023. "Pengelolaan Objek Wisata Dermaga Tepian Mahligai Di Desa Pulau Gadang Kecamatan Xiii Koto Kampar .," 2(1): 22–28.
- Molla, Yoseph, Tjahya Supriatna, and Layla Kurniawati. 2021. "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 6(2): 140–48.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. ed. Syahrani. Banjarmasin: Antasari Press.
- Saputra, Aco Nata et al. 2023. "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Polewali Mandar." 5: 1–9.
- Sugiono, Prof. Dr. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA,Cv.
- Sumitro S. Syawal, Sofjan Alizar. 2023. "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Teluk Powate Sebagai Destinasi Wisata Di Pulau Makian." *Jurnal Government of Arcipelagi*: 1–7.
- Surya, Iman, Sanny Nofrima, Herdin Arie Saputra, and Niken Nurmiyati. 2021. "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus: Wisata Kebun Teh Nglinggo)." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 6(2): 190–99.
- Tongkotow, Nadia. F, Welly Waworundeng, and Alfon Kimbal. 2021.

“Collaborative Governace Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban Di Kecamatan Ratatotok.” *Jurnal Governance* 1(1): 1–11.

Yunanto, Sutoro Eko. 2021. “Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan Sutoro.” 2: 1–19.

Lampiran

Lampiran 1 1 Panduan wawancara

A. Proses *Collaborative Governance* Kalurahan Potorono Dalam Pengelolaan Objek Wisata Embung Potorono

1. Bagaimana proses kolaborasi pengelolaan objek wisata embung Potorono?
2. Bagaimana keterlibatan prinsip dapat diwujudkan dalam kolaborasi pengelolaan objek wisata?
3. Bagaimana dinamika yang terjadi dalam proses pengelolaan embung Potorono?
4. Bagaimana musyawarah atau diskusi bersama untuk memajukan objek wisata embung Potorono
5. Bagaimana kepercayaan bersama dapat dicapai dalam kolaborasi pengelolaan objek wisata embung Potorono?
6. Bagaimana supaya pemahaman bersama dapat terwujud dalam proses kolaborasi pengelolaan objek wisata embung Potorono?
7. Bagaimana komitmen yang ada dalam proses kolaborasi pengelolaan embung Potorono?
8. Bagaimana prosedur dan kesepakatan bersama yang terjalin dalam kolaborasi pengelolaan objek wisata embung Potorono?
9. bagaimana cara menciptakan pengetahuan dari setiap anggota yang terlibat dalam proses kolaborasi terhadap tugas dan fungsinya?
10. Bagaimana cara dalam memfasilitasi kolaborasi pengelolaan objek wisata embung Potorono?

11. Bagaimana dampak kolaborasi pengelolaan embung Potorono

12. Bagaimana adaptasi atau cara menyikapi dari dampak kolaborasi

B. Pemberdayaan Pokdarwis Dalam Pengelolaan Embung Potorono

1. Bagaimana pemberdayaan untuk kolaborasi pengelolaan objek wisata embung Potorono?

2. Bagaimana bentuk dukungan atau support untuk memajukan kolaborasi pengelolaan embung Potorono?

3. Bagaimana komunikasi atau interaksi dalam pemberdayaan kolaborasi embung Potorono?

4. Bagaimana peran Pokdarwis dalam menyerap atau menyampaikan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan terkait kolaborasi pengelolaan objek wisata embung Potorono?

Lampiran 1 2 Ringkasan Data

Jenis Data	Tahap Dari Teknik Pengumpulan Data	Sumber	Manfaat Data Dalam Analisis
Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendekatan kepada informan yang akan dijadikan sumber data, dengan bekal yang sudah kita dapatkan ketika melakukan observasi 2. Mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang terlibat dalam kolaboratif (wawancara satu arah) 3. Dalam wawancara jika menemukan jawaban yang berulang-ulang maka akan diberhentikan 4. Mencatat atau merekam jawaban yang disampaikan 	<p>Sumber wawancara dari penelitian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintahan Kalurahan Potorono (staf atau pegawai Kalurahan dan kepala desa) 2. Kelompok pengelola objek wisata embung Potorono (ketua, anggota) 3. Para pedagang yang berjualan di sekitar embung Potorono 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari pihak-pihak yang terlibat tentang penelitian ini
Observasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengamati dan menulis setiap data atau informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian (embung Potorono) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan gambaran yang terjadi di objek penelitian

	yang telah didapatkan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kelompok pengurus embung Potorono 3. Penjual yang berada di sekitaran embung Potorono 	sebagai bahan bekal sebelum melakukan wawancara
Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta dokumen struktur Pemerintah Kalurahan 2. Meminta dokumen struktur Pokdarwis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintahan Kalurahan Potorono 2. Pengurus objek wisata embung Potorono 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bisa dijadikan sebagai bukti penelitian jika nantinya ditemukan perbedaan antara informasi satu dengan informasi lainnya

lampiran 2 1 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax (0274) 515989 - Yogyakarta 55225

Nomor : 030/PEM/J/X/2023

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Fahmi Maulana Ikhsan
No. Mahasiswa : 20520058
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul : 18 Oktober 2023
Judul Proposal : Kolaboratif Governance dalam Pengelolaan Objek Wisata
Embung Potorono dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
(Studi Kasus di Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Ketua Program Studi



Samaloisa

lampiran 2 2Surat Permohonan Izin Penelitian



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• INDIK PERSEKUTUAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA IV, STATUS TERAKREDITASI B
• YOGYAKARTA SENTER PEMBELAJARAN BUDAYA, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI S1 DAN S2, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI S1 DAN S2, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989 website: www.apmd.ac.id e-mail: info@apmd.ac.id

Nomor : 916/1U/2023
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 13 Desember 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Fahmi Maulana Ikhsan
No Mhs : 20520058
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Collaborative Governance dalam Pengelolaan Objek Wisata Embung Potorono
Tempat : Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul
Dosen Pembimbing : Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon berkenan untuk memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 7 Desember 2023
Ketua

Drs. Eko Yunanto
NIP. 170 230 190



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

Alamat: Jl Timoho No. 317 Yogyakarta 55225 Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website www.apmd.ac.id e-mail info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 514/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Fahmi Maulana Ikhsan
Nomor Mahasiswa : 20520058
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan,
Kabupaten Bantul
b. Sasaran : Collaborative Governance dalam Pengelolaan Objek
Wisata Embung Potorono
c. Waktu : 13 Desember 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 7 Desember 2023
Ketua

Satoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

Lampiran 3 1 Dokumentasi



Wawancara Bersama Bapak Sumarwinto Sebagai Carik Kalurahan Potorono



Wawancara Bersama Bapak Toriq Fauzi Sebagai Ulu-Ulu Kalurahan Potorono



Wawancara Bersama Bapak Prawanta Sebagai Lurah Kalurahan Potorono



Wawancara bersama Bapak Bachron Sebagai Ketua Kelompok Pengelola Embung Potorono



Wawancara Bersama Sumarjono Sebagai Anggota Pengelola Embung Potorono

Lampiran 4 1 SK

SK Destinasi Pariwisata Kabupaten Bantul

<https://drive.google.com/file/d/13YgJV4TQajcVsWpogWUd8DjNKMXL8UwU/view?usp=drivesdk>

SK No. 75 th 2021 Tentang POKDARWIS

<https://docs.google.com/document/d/13JbyVd0r-wSmueZhSdKvso6i5rFIQVe7/edit?usp=drivesdk&oid=109988892328373762811&rtpof=true&sd=true>